

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Melda Mariana Poeh^{1*}, Giska Ndun², Darwin Yopie Kefi³, Septia Sakalini Dioh⁴
^{1,2,3,4} Politeknik Negeri Kupang
*E-mail: poeh_melda@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze the factors that influence the absorption of the budget in the East Nusa Tenggara Provincial Government. The research sample is respondents who hold positions in fields related to the budget, including paying officials and operating expenses at SKPD in NTT Province. This study uses quantitative analysis with multiple linear regression analysis tools. The results of this study indicate that there is a positive and significant influence of human resources and the procurement of goods and services on the absorption of the East Nusa Tenggara Provincial Government's budget, while planning has a positive correlation but no significant effect on the absorption of the East Nusa Tenggara Provincial government's budget. The significant level planning variable ($0.276 > 0.005$) is more than the significant limit so that it can be said to be a rejected variable, the level of human resources ($0.000 < 0.005$) is less than significant so that bid 2 is accepted, the significant variable is the procurement of goods and services ($0.000 < 0.005$) < 0.005 is less than the significant limit so that 3 is confirmed to be accepted, and the F test results with a significant value of 0.000 ($p < 0.05$). Thus it can be said that planning, human resources and procurement of goods and services simultaneously affect the absorption of the budget.

Keywords: Budget absorption, budget planning, human resources, procurement of goods & services

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara. Pemerintah daerah menjalankan keuangan Negara menganut asas desentralisasi yang biasa disebut juga sistem otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan. UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa satu tahun anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang

hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Anggaran dalam sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dalam mengawasi pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perencanaan dan penganggaran APBD tertuang dalam Perencanaan dan penganggaran APBD tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD yang berpedoman pada Rencana Kerja SKPD. Rencana kerja anggaran dan rencana kerja SKPD akan disampaikan kepada DPRD sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) untuk disahkan menjadi APBD. Anggaran merupakan hasil dari

perumusan dan perencanaan strategis yang dibuat, anggaran yang telah dibuat haruslah mencakup aspek-aspek anggaran sektor publik yaitu, aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik.

Anggaran sektor publik menjadi sangat penting karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan apakah pemerintah dapat bertanggungjawab atas dana yang diterima dari masyarakat. Dana milik masyarakat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola pemerintah berasal dari pajak, retribusi, laba perusahaan atau badan usaha milik daerah atau Negara.

APBD mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Permasalahan mengenai realisasi yang belum selesai dengan target yang telah ditetapkan dialami oleh banyak instansi atau Lembaga Pemerintah tidak hanya tingkat pusat namun juga di daerah-daerah Kabupaten atau Kota. Menurut Siswanto dan Rahayu (2011) dalam kurung waktu satu tahun terakhir, belanja Kementerian atau Lembaga telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang rendah pada semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan hal itu maka salah satu aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh Pemerintah Daerah adalah anggaran dan pengelolaannya.

APBD memuat pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan daerah. Anggaran belanja yang dianggarkan di dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Belanja daerah sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Oleh karena itu serapan belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Meskipun demikian bukan berarti capaian penyerapan anggaran belanja diperbolehkan lebih rendah dari yang direncanakan. Penyerapan anggaran merupakan rencana sistimatis yang berisikan tentang keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang berlaku dalam waktu tertentu untuk selanjutnya diwujudkan secara nyata. Secara garis besar penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat nanti. Sedangkan untuk penyerapan belanja yang lebih rendah memiliki risiko lebih luas. (BPKP, 2011) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran yang tidak memenuhi target menyebabkan dan terlambat atau bahkan tidak memenuhi target menyebabkan dana terlambat atau bahkan

tidak tersalurkan kepada masyarakat dan tidak tersalurkan kesistem perekonomian, sehingga penerima manfaat tidak sepenuhnya bisa menikmati hasil pembangunan dan pelayanan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Lambatnya penyerapan anggaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perencanaan anggaran yang tidak akurat, ketidaktepatan dan konsep perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang mengakibatkan sulitnya pelaksanaan anggaran sehingga berdampak pada program kerja yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan serta lambat proses penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran, sumber daya manusia dimana Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat yang mengelola keuangan juga menjadi faktor penyerapan anggaran. Permasalahan sumber daya manusia yang mengelola keuangan diantaranya adalah kurangnya jumlah pegawai, adanya rangkap tugas, hal itu karena tidak seimbang antara paket pekerjaan dengan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan pola mutasi yang merata.

Fenomena ini juga ditemukan terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tahun anggaran 2018-2021, pada Laporan Realisasi Anggaran SKPD mencatat hampir setiap tahun anggaran ada dana yang tidak terealisasi di kas. Kegagalan target penyerapan anggaran berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan yang artinya ada dana yang menganggur, yang akan berdampak pada alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Pada Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%
2018	5.190.622.198.767,00	4.846.839.267.377,67	343.782.931.389,33	93,38
2019	5.769.807.564.376,55	5.277.547.018.227,30	492.260.546.149,25	91,47
2020	6.346.051.509.714,00	5.755.258.016.548,64	590.793.493.165,36	90,69
2021	6.876.284.082.647,00	5.504.822.749.077,69	1.371.461.333.569,31	80,06

Data pada tabel 1 menunjukkan terjadi penurunan penyerapan anggaran dari tahun

2018 sampai dengan 2021 dan presentase penyerapan anggaran belum mencapai 95%. Dapat dilihat pada tahun 2018 penyerapan anggaran sebesar 93,38% namun mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 91,47%, pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 90,69% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 80,06%. Kegagalan target penyerapan anggaran ini mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki Negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan Negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, Pemerintah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran dengan baik, apabila mengingat sumber daya dan potensi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sangat terbatas. *Underfinancing* ataupun *overfinancing* yang timbul karena lemahnya perencanaan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Padahal tugas utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tentang "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Entitas Pelaporan atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berlokasi di Jalan El Tari Nomor. 52, Kota Kupang. Serta 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi NTT, Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif atau hubungan. Pada penelitian ini bentuk hubungan yang digunakan adalah hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Jenis data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif berupa Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran Provinsi NTT tahun 2018-2021.

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Data Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi NTT selama empat tahun

terakhir dari tahun 2018-2021, Data Realisasi Anggaran Belanja per SKPD pada Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama empat tahun terakhir dari tahun 2018-2021, data program rencana kerja perangkat daerah (Renja) selama empat tahun dari 2018-2021, data jumlah pegawai pengelola keuangan pada SKPD, serta data tingkat pendidikan pengelola keuangan pada SKPD sedangkan Data Sekunder dalam penelitian ini berdasarkan data kepustakaan, literature-literatur, serta buku atau jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran baik dari perencanaan, sumber daya manusia serta barang dan jasa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan koesioner kepada respondent dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengguna Anggaran (Kepala SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara pengeluaran SKPD. Penentuan besarnya sampel dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2016) teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu Negara, provinsi atau kabupaten berdasarkan kriteria tertentu sampel yang digunakan berjumlah 30 orang terdiri dari Pengguna Anggaran (Kepala SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara pengeluaran SKPD yang tersebar pada 10 SKPD yang berada dibawah pemerintahan Provinsi NTT, yaitu Badan Keuangan Daerah, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Biro Umum, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Sosial, dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi berganda dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) 22. Beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kualitas Data berupa Uji Validitas, Uji realibilitas, Uji Asumsi Klasik Dan uji hipotesis untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan akan menolak atau menerima hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan uji t, uji F serta Analisis Koefisien Determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validitas Data

Jumlah sampel (n) adalah 30 dengan tingkat alpha yang digunakan adalah 0,05 maka nilai r_{tabel} adalah 0,361. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil pengujian validitas menggunakan program SPSS 22. Hasil pengujian pada tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan/ Pernyataan telah memenuhi syarat.

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item	r_{tabel}	r_{hitung}	Status
Penyerapan Anggaran	Y1	0,361	0,606	Valid
	Y2	0,361	0,610	Valid
	Y3	0,361	0,654	Valid
	Y4	0,361	0,584	Valid
	Y5	0,361	0,712	Valid
	Y6	0,361	0,644	Valid
	Y7	0,361	0,588	Valid
	Y8	0,361	0,679	Valid
Perencanaan (X1)	X1.1	0,361	0,650	Valid
	X1.2	0,361	0,664	Valid
	X1.3	0,361	0,613	Valid
	X1.4	0,361	0,703	Valid
	X1.5	0,361	0,598	Valid
	X1.6	0,361	0,647	Valid
	X2.1	0,361	0,571	Valid
	X2.2	0,361	0,604	Valid
Sumber Daya Manusia (X2)	X2.3	0,361	0,683	Valid
	X2.4	0,361	0,713	Valid
	X2.5	0,361	0,564	Valid
	X2.6	0,361	0,704	Valid
	X2.7	0,361	0,751	Valid
	X2.8	0,361	0,695	Valid
	X3.1	0,361	0,755	Valid
	X3.2	0,361	0,588	Valid
Barang dan Jasa (X3)	X3.3	0,361	0,834	Valid
	X3.4	0,361	0,749	Valid

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian telah memenuhi syarat valid dan realibel, sehingga data yang diperoleh dari instrumen penelitian (kuesioner) dapat digunakan untuk analisis pada tahapan selanjutnya.

Tabel. 3 Uji Realibitas

Variabel	Nilai Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Perencanaan (X1)	0,788	0,6	Realibel
Sumber Daya Manusia (X2)	0,710	0,6	Realibel
Pengadaan Barang dan Jasa (X3)	0,812	0,6	Realibel
Penyerapan Anggaran Belanja (Y)	0,714	0,6	Realibel

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dari tabel 4 diketahui bahwa nilai sig Kolmogorov smirnov di atas atau lebih besar dari 0,05 (sig>0,05) maka asumsi normalitas

terpenuhi.

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	1.95475975
Most Extreme Differences	Absolute	0.105
	Positive	0.07
	Negative	-0.105
Test Statistic		0.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Multikolieritas

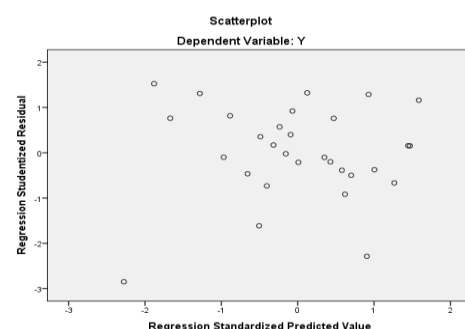
Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai tolerance pada keseluruhan model bernilai di atas 0,10 (>0,10) dan nilai VIF masing-masing model di bawah 10 (<10). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolieritas antar variabel dalam model regresi

Tabel 5. Uji Multikolieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Perencanaan (X1)	0,928	1,077	Non Multikolieritas
Sumber Daya Manusia (X2)	0,981	1,019	Non Multikolieritas
Pengadaan Barang dan Jasa (X3)	0,917	1,091	Non Multikolieritas

Uji Heteroskedastisitas

Jika dilihat pada Gambar 1 uji asumsi klasik, semuagrafik plot yang ada menunjukkan bahwa persamaan yang telah diuji tidak mengandung heteroskedastisitas. Artinya bahwa tidak ada korelasi antara besarnya data dengan residual, sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan residual (kesalahan) yang semakin besar pula.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Uji Hipotesis

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistic yakni regresi linear berganda. Model regresi berganda adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari berbagai variabel independent terhadap suatu variabel dependent. Dengan demikian persamaan regresi linear berganda diperoleh:

$$Y = -2,092 + 0,191 + 0,567 + 0,903 \times e$$

Adapun penjelasan dari persamaan regresi diatas adalah:

- Nilai konstanta sebesar -2,092 menunjukkan pengaruh negatif variabel independen (perencanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa). Apabila variabel independen naik atau terpengaruh dalam satu satuan maka variabel penyerapan anggaran belanja akan naik atau dipengaruhi.
- Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,191 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan perencanaan sebesar satu satuan maka penyerapan anggaran belanja akan meningkat sebesar 0,191 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- Nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,567 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan sumber daya manusia sebesar satu satuan maka penyerapan anggaran belanja akan meningkat sebesar 0,567 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- Nilai koefisien regresi X3 sebesar 0,903 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan pengadaan barang dan jasa sebesar satu satuan maka penyerapan anggaran belanja akan meningkat sebesar 0,903 dengan asumsi variabel yang lain konstan

Uji F

Dalam penelitian ini cara yang digunakan yaitu dengan membandingkan nilai F-hitung dan Ftabel. Jika F-hitung < F-tabel, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). Jika F-hitung > F-tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

Berdasarkan tabel 6 diketahui F_{hitung} memiliki nilai 11,762 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2,98 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perencanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa secara

simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja

Tabel 6. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	150.389	3	50.13	11.762	.000 ^b
	Residual	110.811	26	4.262		
	Total	261.2	29			

a. Dependent Variable: Y
 b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Uji T

Kaidah pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai alpha (0,05) atau 5% dengan nilai signifikan (nilai P-Value), yakni: Jika P-Value $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak, sebaliknya jika P-Value $\leq 0,05$, maka hipotesis diterima.

Tabel 7. Uji T

Model	Coefficients ^a				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-2.092	7.325			-0.286	0.777
X1	0.191	0.172	0.148		1.113	0.276
X2	0.567	0.136	0.537		4.168	0
X3	0.903	0.193	0.626		4.691	0

a. Dependent Variable: Y

1) Perencanaan

Berdasarkan tabel di atas tingkat signifikansi variabel X1 perencanaan (0.276) lebih dari (0.05) dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($1,113 \leq 2,055$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel perencanaan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran belanja (Y) serta memiliki arah pengaruh positif ($B = 0,191$) oleh karena itu hipotesis **1 tidak diterima**. Hal ini berarti semakin baik perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT maka tidak akan meningkatkan penyerapan anggaran belanja.

2) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan tabel di atas tingkat signifikansi variabel X2 sumber daya manusia (0.000) kurang dari (0.05) dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($4,168 \geq 2,055$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel perencanaan (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran belanja (Y) serta memiliki arah pengaruh positif ($B = 0,537$)

oleh karena itu hipotesis 2 **diterima**. Hal ini berarti semakin baik sumber daya manusia yang ada pada Pemerintah Provinsi NTT maka meningkatkan penyerapan anggaran belanja.

3) Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan tabel di atas tingkat signifikansi variabel X3 pengadaan barang dan jasa (0,000) krang dari (0.05) dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($4,691 \geq 2,055$) maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel perencanaan (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran belanja (Y) serta memiliki arah pengaruh positif ($B = 0,626$) oleh karena itu hipotesis 3 **diterima**. Hal ini berarti semakin baik pengadaan barang dan jasa yang ada pada Pemerintah Provinsi NTT maka meningkatkan penyerapan anggaran

Uji Koefisien Determinasi

Data di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai R square berdasrakan hasil uji koefisien determinasi adalah 0,527 yang mana nilai tersebut merupakan hasil dari pengkuadratan R. dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,527 yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel independen (perencanaan, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa) terhadap variabel dependen (penyerapan anggaran belanja) adalah sebesar 52,7% sedangkan sisanya 47,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termaksud dalam penelitian ini seperti administrasi, regulasi, dan uang persediaan

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.759 ^a	0.576	0.527	2.064

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Pembahasan.

Pengaruh Perencanaan Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Hipotesis pertama yang diajukan penelitian ini ialah terkait hubungan variabel perencanaan dan penyerapan anggaran belanja. Nilai koefisien berdasarkan hasil pengujian hipotesis yaitu koefisien sebesar 0,191 yang menunjukkan bahwa variabel perencanaan dan positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Namun nilai t hitung lebih

kecil dari t tabel ($1,113 \leq 2,055$) serta nilai tingkat singnifikansi variabel X1 perencanaan (0,276) lebih dari (0.05). Berdasarkan nilai tersebut maka hipotesis pertama ditolak atau dapat disimpulkan bahwa semakin baik perencanaan pada Pemerintah Provinsi NTT maka tidak akan meningkatkan penyerapan anggaran belanja secara signifikan. Nilai koefisien berdasarkan hasil pengujian hipotesis yaitu koefisien sebesar 0,191 yang menunjukkan bahwa variabel perencanaan berkorelasi positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pertanyaan kuisiner mengenai perencanaan pertanyaan kuisiner dijawab oleh sebagian besar respoden adalah pilihan jawaban pada skala 3, sehingga dapat disimpulkan perencanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja, dalam penelitian ini ditemukan masih ada faktor yang menyebabkan perencanaan pada Pemerintah Provinsi NTT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pada Pemerintah Provinsi NTT sudah cukup baik, namun masih ada juga faktor yang mengurangi kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Hal ini dapat dilihat pernyataan "dalam penyusunan anggaran, waktu yang tersedia sudah cukup sehingga data pendukung bisa lengkapi" yang memiliki jumlah total terkecil, artinya pelaksanaan perencanaan anggaran yang ada pada Pemerintah Provinsi NTT masih membutuhkan waktu yang lebih untuk melengkapi data tambahan yang dibutuhkan dalam penyusunan program serta kegiatan yang akan dilakukan, karena data tambahan akan sangat mambantu sehingga dalam proses pelaksanaan anggaran nanti kesalahan dan kekeliruan dapat diminimalisir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rahmawati dan Ishak, 2020) bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dikarenakan terdapat permasalahan teknis baik dalam perencanaan maupun eksekusi perencanaan seperti perencanaan anggaran yang terjadi tidak tepat waktu serta terjadi perubahan pada akhir tahun anggaran. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulandari et al, (2021) dan Rahmadhani dan Setiawan (2019).

Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil pengujian variabel kompetensi sumber daya manusia (X2) terhadap variabel penyerapan anggaran (Y) dengan tingkat signifikansi 0.000 serta nilai koefisien regresi 0,567, menunjukkan adanya

pengaruh positif signifikan. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia (SDM) maka tingkat penyerapan anggaran akan semakin meningkat. Dengan kata lain, semakin kompeten pengelola anggaran, maka tujuan organisasi seperti penyerapan anggaran lebih mudah terealisasi. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis kedua yang menduga adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia (X2) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y), sehingga hipotesis kedua dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil pernyataan yang ada dalam kuisioner penelitian mengenai sumber daya manusia yang dijawab oleh responden sebagian besar pernyataan dijawab dengan skala 4 dan 5, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin memadai kompetensi SDM yang ada pada Pemerintah Provinsi NTT maka akan meningkatkan kualitas penyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi NTT. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban kuisioner terhadap variabel penyerapan anggaran belanja dimana pernyataan-pernyataan yang ada dijawab dengan skala 5 dan 4, ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi NTT masih tergolong tinggi..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SDM pada Pemerintah Provinsi NTT sudah cukup memadai namun masih ada juga faktor yang mengurangi kualitas SDM yang ada pada Pemerintah Provinsi NTT. Hal ini dapat dilihat pernyataan "Instansi/organisasi menyediakan fasilitas untuk pegawai yang akan mengikuti pelatihan/sertifikasi" yang memiliki jumlah total terkecil, artinya SDM yang ada pada Pemerintah Provinsi NTT masih membutuhkan pelatihan/sertifikasi untuk meningkatkan performa dalam bekerja terutama dalam zaman moderen saat ini.

Hasil ini sesuai dengan asas profesional yang diatur dalam *public finance theory* yang mengharuskan pengelolaan anggaran ditangani oleh tenaga yang ahli. Kemudian dari sisi tujuan utama *public finance*, yaitu menentukan alokasi sumber daya serta mengetahui pengaruhnya dari penempatan tersebut terhadap keperluan individu maupun keperluan masyarakat serta pemerintah seperti mengatur sektor-sektor penting pemerintahan, memfasilitasi kegiatan ekonomi pemerintah dan sektor swasta, menyediakan layanan dasar kepada masyarakatnya, menyediakan layanan sosial, memastikan stabilitas ekonomi dan mencapai tingkat pembangunan. Terkait dengan peran pemerintah yang besar dalam menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat yang optimal dan kebijakan

pemerintah harus ditujukan untuk mencapai alokasi sumber ekonomi yang efisien, redistribusi pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi, maka permasalahan pemerintah menjadi demikian kompleks yang tidak hanya melihat pada sisi anggaran saja tetapi juga pengaruh langsung dan tidak langsung dari kegiatan perekonomian agregat. Oleh sebab itu pemerintah dituntut memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola aktivitas pemerintahan seperti menentukan kebijakan dan pengelolaan anggaran. Kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap perilaku diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dalam jabatannya,

Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil pengujian variabel kompetensi pengadaan barang dan jasa (X3) terhadap variabel penyerapan anggaran (Y) dengan tingkat signifikansi 0.000 serta nilai koefisien regresi 0,903, menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi proses pengadaan barang dan jasa maka tingkat penyerapan anggaran akan semakin meningkat. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis ketiga yang menduga adanya pengaruh pengadaan barang dan jasa (X3) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y), sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima.

Semakin baik proses pengadaan barang dan jasa yang ada pada Pemerintah Provinsi NTT maka akan meningkatkan kualitas penyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi NTT. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban kuisioner terhadap variabel penyerapan anggaran belanja dimana pernyataan-pernyataan yang ada dijawab dengan skala 5 dan 4, ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi NTT masih tergolong tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Provinsi NTT sudah cukup baik namun masih ada juga faktor yang mengurangi proses pengadaan barang dan jasa yang ada pada Pemerintah Provinsi NTT. Hal ini dapat dilihat pernyataan "Proses lelang pengadaan barang dan jasa membutuhkan waktu yang cukup lama" dalam hal ini panitia pelaksanaan lelang tidak dapat mengikuti setiap jadwal yang telah ditentukan dalam proses lelang sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses pencairan dan penyaluran anggaran, sehingga akan menghambat kegiatan pengadaan barang

dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ialah kegiatan yang secara spesifik menjalankan fungsi anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian sejalan dengan teori tersebut yaitu pengadaan barang dan jasa berhubungan secara signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran melalui barang dan jasa memiliki pengaruh yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada skala mikro maupun makro.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ulandari, 2021) menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa tidak terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Secara deskriptif juga responden memiliki persepsi ragu-ragu bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

Pengaruh Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang dan jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja

Semua variabel independen (perencanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa) diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (penyerapan anggaran belanja), berdasarkan hasil uji data analisis linear berganda menggunakan SPSS diperoleh hasil uji simultan (uji F) dengan nilai Fhitung lebih besar dari pada F tabel dan nilai signifikan $0,00 \leq 0,05$, maka sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji F disimpulkan bahwa perencanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap penyerapan anggaran belanja.

PENUTUP

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh positif tapi tidak signifikan faktor perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Hal ini bermakna semakin baik perencanaan anggaran maka tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Dikarenakan terdapat permasalahan teknis baik dalam perencanaan maupun eksekusi perencanaan seperti perencanaan anggaran yang terjadi tidak tepat waktu serta terjadi perubahan pada akhir tahun anggaran. Ini berarti bahwa semakin matang aparatur pemerintah sebagai pengelola anggaran dalam merencanakan, maka setiap program kerja/kegiatan tersebut dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik namun

tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan faktor sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran yang berarti terdapat pengaruh positif signifikan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap penyerapan anggaran. Hal ini bermakna apabila aparatur pemerintah pengelola anggaran didukung oleh kompetensi yang tinggi, maka akan memengaruhi perilaku kerja aparatur pemerintah yang kemudian akan memengaruhi kinerjanya serta kinerja organisasi secara umum. Artinya, semakin tinggi kompetensi pengelola anggaran (SDM), akan semakin meningkatkan kinerja organisasi yang dalam hal ini adalah target penyerapan anggaran. Begitupun variabel pengadaan barang dan jasa terdapat pengaruh positif dan signifikan faktor pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran yang artinya pengadaan barang dan jasa berhubungan positif signifikan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran. Hal ini bermakna apabila proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prosedur dan waktu yang tepat maka penyerapan anggaran belanja akan semakin meningkat. Pada pengujian simultan ditemukan bahwa menunjukkan bahwa variabel Perencanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap penyerapan anggaran belanja,

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberi saran kepada pemerintah provinsi NTT untuk Setiap satuan kerja perlu meningkatkan proses perencanaan anggaran dengan memberikan waktu yang cukup untuk menyusun, menelaah hingga merevisi anggaran. Serta perencanaan anggaran sebaiknya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan agar setiap perencanaan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Satuan Kerja perlu menyediakan fasilitas untuk pegawai yang akan mengikuti pelatihan/sertifikasi artinya SDM yang ada pada Pemerintah Provinsi NTT masih membutuhkan pelatihan /sertifikasi untuk meningkatkan performa dalam bekerja terutama dalam zaman moderen saat ini dan dalam keadaan dimana protokol kesehatan diterapkan disetiap kantor. Satuan kerja perlu memperhatikan waktu dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini panitia pelaksanaan lelang tidak dapat mengikuti setiap jadwal yang telah ditentukan dalam proses lelang yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pencairan dan penyaluran anggaran, sehingga akan menghambat kegiatan pengadaan barang

dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

BPKP. (2011) Menyoal Penyerapan Anggaran.
Yogyakarta: Paris Review.

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK)
Nomorr 249/PMK.02/2011 *tentang*
Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas
Pelaksanaan Rencana Kerja Dan
Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.

Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019).
Pengaruh regulasi, politik anggaran,
perencanaan anggaran, sumber daya
manusia dan pengadaan barang/jasa
terhadap penyerapan anggaran belanja
pada opd provinsi sumatera barat. *Jurnal*
Eksplorasi Akuntansi, 1(2), 710-726.
<https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>

Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis
Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi
Penyerapan Anggaran Belanja Pada
Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian*
Accounting Research Journal, 1(1), 180-
189.

Siswanto dan Rahayu. 2011. *Faktor-faktor*
Penyebab Rendahnya Penyerapan
Belanja Kementerian/Lembaga TA.
2010. Jurnal Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Indonesia.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
PT Alfabet.

Ulandari, V., Akram, A., & Santoso, B. (2021).
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penyerapan Anggaran Belanja pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan
Administrasi Sebagai Pemoderasi. *E-*
Jurnal Akuntansi, 31(6), 1577-1591.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 *tentang*
Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*